

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN
ANTARA BBWS BENGAWAN SOLO DENGAN PENYEDIA
JASA KONSULTANSI TENTANG PEMBANGUNAN
BENDUNGAN DI WILAYAH KERJA BBWS BENGAWAN SOLO**



**Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**TINO ARDIANTO
C100150144**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN ANTARA
BBWS BENGAWAN SOLO DENGAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
TENTANG PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI WILAYAH KERJA
BBWS BENGAWAN SOLO**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

TINO ARDIANTO

C100150144

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing



Darsono, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN ANTARA
BBWS BENGAWAN SOLO DENGAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
TENTANG PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI WILAYAH KERJA
BBWS BENGAWAN SOLO**

Oleh:

TINO ARDIANTO

C100150144

**Telah dipertahankan di Depan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, Tanggal 30 Januari 2021
Dan dinyatakan memenuhi syarat**

Dewan Penguji

1. Darsono, S.H., M.H

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Septarina Budiwati S.H., M.H

(Anggota I Penguji)

(.....)

3. Nuswardani S.H., S.U.

(Anggota II Penguji)

(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzifah Dimyati, S.H., M. Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Publikasi Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Desember 2020

Yang menyatakan



Tino Ardianto

C100150144

Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Antara Bbws Bengawan Solo Dengan Penyedia Jasa Konsultansi Tentang Pembangunan Bendungan Di Wilayah Kerja Bbws Bengawan Solo

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kontrak pekerjaan antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam pembangunan bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo. 2) untuk mengetahui kendala yang dialami BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia jasa konsultasi dalam melaksanakan pembangunan bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo. Dan 3) untuk mengetahui upaya BBWS Bengawan Solo dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembangunan bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penulis melakukan penelitian di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Adapun data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari studi kepustakaan. Kemudian analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan perjanjian kontrak antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Pembangunan Bendungan di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, dimana tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi: tahap pengumuman atau pengadaan pelelangan, tahap kualifikasi atau seleksi, tahap evaluasi, penetapan calon pemenang, tahap masa sanggah dan tahap pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama. 2) Kendala yang dihadapi BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam pembangunan Bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo, biasanya adalah kendala yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, dimana terkadang proses atau kemajuan pembangunan terlambat dari rencana yang dijadwalkan. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul tersebut adalah musyawarah dan mufakat diantara para pihak.

Kata Kunci: perjanjian kontrak, jasa konsultasi, pembangunan

Abstract

The objectives of this study are: 1) to determine the implementation of the work contract agreement between BBWS Bengawan Solo and the Consulting Service Provider in the construction of the dam in the working area of BBWS Bengawan Solo. 2) to find out the obstacles experienced by BBWS Bengawan Solo with consulting service providers in carrying out dam construction in the working area of BBWS Bengawan Solo. And 3) to find out the efforts of BBWS Bengawan Solo in overcoming obstacles in the implementation of dam construction in the BBWS Bengawan Solo work area. The approach used in this research is jurisdictional empirical method and the type of research used is descriptive. The

author conducted research at the office of the Bengawan Solo River Basin. The data in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data in this study were obtained from interviews, while secondary data were obtained by researchers from literature studies. Then the data analysis in this study using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that 1) The implementation of the contract agreement between BBWS Bengawan Solo and Consulting Service Providers in Dam Construction in the Working Area of BBWS Bengawan Solo is based on the Regulation of the Minister of Public Works Number 07 / PRT / M / 2011 concerning Standards and guidelines for the procurement of construction work and services. consultation, in which the stages carried out include: the announcement or tender procurement stage, the qualification or selection stage, the evaluation stage, the determination of the potential winner, the objection period stage and the implementation stage of the cooperation contract agreement. 2) Constraints faced by BBWS Bengawan Solo with consulting service providers in dam construction in the working area of BBWS Bengawan Solo, usually are constraints related to implementation time, where sometimes development progress or progress is delayed from the scheduled plan. 3) Efforts made to overcome the obstacles that arise are deliberation and consensus between the parties.

Keywords: contract agreements, consulting services, development

1. PENDAHULUAN

Perjanjian khusus antara pemerintah dengan jasa konsultasi berdasar dari suatu perjanjian berawal adanya suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak. Hubungan perjanjian tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Adanya negosiasi para pihak dapat menciptakan suatu bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.¹ Perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.² Subekti mengatakan, orang bebas membuat perjanjian

¹ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, halaman 1

² *Ibid*

apapun asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan yang diatur didalam buku II KUHPerdara.³ R. Subekti menjelaskan bahwa secara definitif, perjanjian itu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁴ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara.⁵

Perjanjian kontrak tersebut dibuat harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu kontrak, diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan antar pihak yang terikat ; cakap untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif, yang meliputi dua unsur pertama yang berhubungan dengan subyek (pihak) yang mengadakan kontrak, dan unsur obyektif, yang berkaitan langsung dengan obyek kontrak yang dibuat. Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak, dan kecakapan dari pihak-pihak yang membuat kontrak, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut, yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum⁶

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa,

³ Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa Jakarta. 1982. Hal 127

⁴ R. Subekti, 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Internusa, Halaman 1.

⁵ Pasal 1313 KUHPerdara

⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.14.

tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maka bekerjasama dengan pengelola penyedia jasa dan pengguna jasa konsultan pembangunan bendungan. Penandatanganan surat perjanjian ini sebagai bentuk komitmen kerjasama antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan pada hari yang sama diterbitkan pula Surat Perintah Mulai Kerja.

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak tersebut terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan kondisi di lapangan dimana pada awal perjanjian kontrak, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) selaku pengguna jasa konsultasi telah berasumsi bahwa seluruh informasi yang ada dalam kontrak sesuai dengan kondisi terbaru dan telah disesuaikan dengan kondisi serta iklim yang ada di lapangan, namun kenyataannya berbeda dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Pihak penyedia jasa konsultasi seringkali merasa dirugikan dalam pelaksanaan proyek pembangunan bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo. Hal ini dikarenakan adanya faktor cuaca dan kondisi di lapangan yang membuat pekerjaan pelaksanaan proyek seringkali mengalami kemunduran waktu, serta adanya penambahan material yang diperlukan dalam proyek pembangunan Bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Antara BBWS Bengawan Solo Dengan Penyedia Jasa Konsultansi Tentang Pembangunan Bendungan Di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo”.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang beralamat Jl. Solo – Kartasura Km.7, PO. Box 267 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data pada penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari melalui wawancara dengan Pihak BBWS Bengawan Solo. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang

digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, studi lapangan dan studi kepustakaan. Kemudian metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Pembangunan Bendungan di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo

3.1.1 Dasar Hukum dan Pihak-Pihak dalam Perjanjian Antara BBWS

Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi

Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.⁷ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁸ Bentuk perjanjian yang dilakukan antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Pembangunan Bendungan di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo termasuk dalam perjanjian kerjasama atau perjanjian kontrak.

Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁹ Dalam pengertiannya ini disampaikan bahwa bukan hanya orang per orang yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Perjanjian kerjasama atau pekerjaan kontrak adalah salah satu bentuk

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hal. 6

⁸ Wiryono Projodikoro, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, h.9

⁹ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUHPerdara sehingga tidak memiliki nama khusus (*innominaat*). Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.¹⁰

Adapun dasar hukum yang mendasari perjanjian kontrak kerjasama antara BBWS Bengawan Solo dengan penyedia jasa konsultasi, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 2010
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi
- 5) Peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan jasa atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Dalam perjanjian kontak yang dilaksanakan antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi, terdapat pihak-pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Pihak-pihak tersebut nantinya akan memikul hak dan kewajiban yang harus dapat dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang telah atau akan disepakati nantinya. Adapun pihak-pihak dalam perjanjian kontak yang dilaksanakan antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Pembangunan Bendungan di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo, yaitu **PIHAK SATU** :

| | |
|---------|--|
| Nama | : R. PANJI SATRIO, ST.MT.MDM |
| NIP | : 19781208 200502 1 00 1 |
| Jabatan | : Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Bendungan, SVNT Pembangunan Bendungan |

¹⁰ Irfan Fauzi Daulay. 2016. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Irigasi Antara Cv. Raut Agung Group Dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

BBWS Bengawan Solo, Balai Besar Wilayah
Sungai Bengawan Solo

Berkedudukan di : Jl. Solo – Kartasura Km.7 Po. Box 267 Telp./Fax
(0271) 716428 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo
57162

Yang bertindak untuk dan atas nama **SNVT Pembangunan Bendungan
BBWS Bengawan Solo, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo**,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
72/KTPS/M/2014, Pada tanggal 25 februari 2014, selanjutnya disebut
“**PPK**”, dengan **PIHAK KEDUA** yang berbentuk Kemitraan/KSO yang
beranggotakan masing-masing sebagai berikut:

- a. PT. Binatama Wiwawredha Konsultan
- b. PT. Brahma Seta Indonesia
- c. PT. Barunadri Engineering Consultant

Yang masing-masing anggotanya bertanggung secara pribadi dan
tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap “**PPK**” berdasarkan kontrak
ini dan telah menunjuk:

Nama : **IR. Hari Sidharta, Dipl. HE**

Jabatan : Kuasa KSO “**PT. BINATAMA WIRAWREDHA
KONSULTAN JO PT BRAHMA SETA
INDONESIA JO PT BARUNANDRI
ENGINEERING CONSULTANT**”

Berkedudukan di : Jl. Bintaro Permai A6 Bintaro, Pesanggrahan,
Jakarta Selatan Telp./Fax (021) 7267926

Akta Notaris Nomor : 217

Tanggal : 26 Januari 2012

Notaris : H. Feby Rubein Hidayat, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BINATAMA
WIRAWREDHA KONSULTAN JO PT BRAHMA SETA INDONESIA JO
PT BARUNANDRI ENGINEERING CONSULTANT**, Berdasarkan surat

perjanjian Kemitraan/KSO Nomor : W.115/2013, Tanggal 07 Juni 2013
Selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Adapun Hak dan kewajiban timbal balik dari **PPK** dan **Penyedia** dinyatakan dalam kontak yang meliputi khususnya:

- a. **PPK** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - **Penyedia** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi untuk **PPK** sesuai dengan ketentuan kontak; dan
 - **PPK** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **Penyedia** sesuai dengan ketentuan kontrak.
- b. **Penyedia** mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah berlaku ditentukan dalam kontak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasaran dari **PPK** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PPK**;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PPK**;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemilik akibat kegiatan **Penyedia**;

3.1.2 Isi Pokok Perjanjian kontrak Antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, perjanjian yang dilakukan antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Pembangunan Bendungan di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan jasa atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/satuan kerja perangkat Daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan untuk memperoleh barang/jasa.”

Adapun isi pokok perjanjian kesepakatan yang telah disetujui oleh BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi, adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga penawaran terhadap bagian Lump sum, sebagaimana yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah RP. 19.254.376.900,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) pembayaran kontrak ini dilakukan atas nama penyedia **PT. BINATAMA WIRAWREDHA KONSULTAN JO PT BRAHMA SETA INDONESIA JO PT BARUNANDRI ENGNEERING CONSULTANT** di **PT. BANK BRI KC Bekasi Harapan Indah, Jl. Sentra Niaga Boulevard Hijau Blok C2 No.2 No.2 Harapan Indah Pejuang, Medan Satria Bekasi Barat Nomor Rekening: 0424-01-000428-30-5.**
- b. Ruang Lingkup pekerjaan utama dalam kontak ini terdiri dari:
 - Supervisi pekerjaan jalan masuk dan jalan kerja;

- Supervisi pekerjaan cofferdam;
 - Supervisi pekerjaan saluran pengelak;
 - Supervisi pekerjaan bendungan utama;
 - Supervisi pekerjaan pelimpah/spillway;
 - Pekerjaan lain yang terkait dengan pekerjaan supervisi jasa konsultasi di atas.
- c. Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini;
- d. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
- Addendum surat perjanjian (Apabila ada);
 - Pokok Perjanjian
 - Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - Syarat-syarat khusus kontrak;
 - Syarat-syarat umum kontrak;
 - Kerangka acuan kerja (KAK);
 - Data teknis lainnya;
 - SPPBJ dan BAHS
- e. Dokumen kontrak ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam kontrak dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 (empat) di atas;
- f. Hak dan kewajiban timbal balik **PPK** dan **Penyedia** dinyatakan dalam kontak yang meliputi khususnya:
- c. **PPK** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- **Penyedia** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi untuk **PPK** sesuai dengan ketentuan kontak; dan

- **PPK** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **Penyedia** sesuai dengan ketentuan kontrak.
- d. Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah berlaku ditentukan dalam kontak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasaran dari **PPK** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PPK**;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PPK**;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemilik akibat kegiatan **Penyedia**;
- e. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan pekerjaan untuk setiap hari adalah 1/1.000 (satu per seribu) dari harga kontrak induk dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1.000 (satu per seribu) dari biaya cacat mutu;
- g. Kontrak ini mulai efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 1.440 (Seribu empat ratus empat puluh) hari kalender.

3.1.3 Tahapan Pelaksanaan Perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahapan pelaksanaan perjanjian kontrak antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Pembangunan Bendungan di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, dimana tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Tahap pengumuman atau pengadaan pelelangan

Tahap pengumuman atau tahap pengadaan pelelangan adalah tahap dimana BBWS Bengawan Solo membuka pelelangan jasa konsultan dalam suatu pembangunan yang ditawarkan kepada beberapa perusahaan yang menjadi rekan kerja BBWS Bengawan Solo. Kemudian setelah semua perusahaan konsultan mendaftar, maka tahap selanjutnya adalah tahap seleksi.

b. Tahap kualifikasi atau seleksi

Tahap kualifikasi atau seleksi adalah tahap dimana para perusahaan yang ingin mengikuti pelelang mengajukan semua proposal perencanaan kepada BBWS Bengawan Solo, pada tahap ini BBWS Bengawan Solo melakukan kualifikasi baik secara administrasi maupun teknis dari para perusahaan yang akan mengikuti pelelangan. Bagi perusahaan yang lolos tahap ini selanjutnya mengajukan proposal penawaran kepada BBWS Bengawan Solo.

c. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap dimana BBWS Bengawan Solo melakukan evaluasi terhadap para perusahaan jasa konsultan yang mengikuti pelelangan berdasarkan pada harga yang ditawarkan, rencana teknis yang akan dilakukan serta kelengkapan dokumen perusahaan.

d. Penetapan calon pemenang

Penetapan calon pemenang adalah tahap dimana BBWS Bengawan Solo mengumumkan daftar para perusahaan jasa konsultan dari hasil

evaluasi yang telah dilakukan. Bagi perusahaan yang tidak lolos dalam evaluasi dapat mengajukan banding dalam masa sanggah yang diberikan BBWS Bengawan Solo.

e. Tahap masa sanggah

Masa sanggah adalah tahap dimana para perusahaan yang tidak lolos dalam tahap evaluasi dapat mengajukan banding kepada BBWS Bengawan Solo. Adapun durasi waktu masa sanggah ini biasanya dilakukan 5 hari setelah diumumkannya daftar para calon pemenang lelang. Apabila tidak akan perusahaan yang melakukan banding atau sanggahan, maka tahap selanjutnya yaitu penerbitan surat perintah kerja kepada perusahaan konsultan pemenang lelang.

f. Tahap pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama

Tahap pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama adalah tahap dimana BBWS Bengawan Solo melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan perusahaan konsultan pemenang lelang. Setelah penandatanganan kontrak kerjasama, kemudian BBWS Bengawan Solo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dan tahap selanjutnya perusahaan jasa konsultan yang telah terpilih sebagai pemenang lelang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah disepakati antara perusahaan jasa konsultan dengan BBWS Bengawan Solo.

3.2 Kendala yang dialami BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa

Konsultasi dalam melaksanakan perjanjian kontrak pembangunan

Bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo

Perjanjian kontrak yang dilakukan antara BBWS Bengawan Solo dengan penyedia jasa konsultasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait didalamnya. Dengan kata lain pihak pemberi tugas yaitu BBWS Bengawan Solo dan pihak konsultan harus menaati klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kontrak kerja pembangunan bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo tersebut. Apabila pihak konsultan wanprestasi dalam melaksanakan, maka sebagai akibat dari wanprestasi tersebut pihak konsultan dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam

perjanjian perjanjian kontrak kerja pembangunan bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo.

Rencana pembangunan suatu proyek yang dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo tentu tidak selamanya dapat tercapai seperti yang direncanakan. Banyak hal yang dipengaruhi oleh kehendak manusia maupun diluar kehendak manusia yang mempengaruhi jalannya pelaksana perjanjian pembangunan yang dapat menyebabkan rencana tersebut terhambat atau bahkan kemungkinan rencana tersebut dibatalkan sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kendala yang dihadapi BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam pembangunan Bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo, biasanya adalah kendala yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, dimana terkadang proses atau kemajuan pembangunan terlambat dari rencana yang dijadwalkan. Seperti pada hasil wawancara berikut ini:

Salah satu kendala yang sering terjadi dan ini mungkin termasuk supervisi ini tapi tidak terlalu signifikan artinya masih dalam taraf toleransi itu biasanya keterlambatan, keterlambatan proses, misalnya bulan pertama atau bulan kedua menurut kurva S dia harus mencapai sekian % tapi ternyata belum bisa mencapai apa yang sudah ditargetkan itu. Lha itu biasanya kita sampaikan permasalahannya apa kendalanya apa. Mereka membuat laporan tiap bulan, tiap bulannya yang direncanakan sekian dicapainya sekian, oh ternyata masih kurang sekian persen capainya, itu karena terkendala bla bla bla bla mungkin masalah teknis maupun nonteknis disebutkan, nah biasanya terus kendalanya apa mereka juga sudah menyampaikan rencana penyelesaian nya seperti apa dan itu biasanya segera segera bisa teratasi tapi kalau misalnya itu nanti belum bisa teratasi, itu biasanya direksi nanti ada komunikasi ada pengarahannya dengan konsultan bagaimana-bagaimananya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kendala yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama antara BBWS Bengawan Solo dengan pihak penyedia jasa konsultan adalah masalah yang terkait dengan waktu pelaksanaan dimana terkadang progres pelaksanaan pembangunan sedikit mengalami keterlambatan dari jadwal pelaksanaan yang dilakukan. Namun, biasanya pihak penyedia jasa konsultan juga memberikan

laporan mengenai keterlambatan yang dialami, penyebab terjadinya keterlambatan serta solusi penyelesaian yang akan dilakukan oleh pihak penyedia jasa konsultan.

Mengenai hambatan pelaksanaan pembangunan proyek yang dikarenakan terjadinya keadaan memaksa atau *overmacht*, pemberi tugas biasanya memberikan toleransi kepada pihak konsultan dan mendiskusikan kembali perjanjian pembangunan sehingga kerugian dapat ditanggung bersama. Namun, Apabila pihak konsultan melakukan wanprestasi berupa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak maka konsultan tersebut dapat dikenai sanksi yang biasanya berupa:

1. Teguran dan peringatan-peringatan tertulis.
2. Apabila teguran dan peringatan-peringatan tertulis dua kali berturut-turut tidak diindahkan maka dilakukan penangguhan pembayaran dan pengulangan atau penggantian pekerjaan baik sebagian atau seluruh pekerjaan.
3. Apabila teguran dan peringatan tertulis tiga kali berturut-turut tidak juga diindahkan maka dilakukan pemutusan perjanjian kontrak.

3.3 Upaya BBWS Bengawan Solo untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembangunan bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo

Pelaksanaan pembangunan fisik dibidang jasa konstruksi cukup banyak melibatkan sumber-sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam berupa bahan bangunan, sumber daya tenaga dan energi peralatan, mekanikal dan elektrik, serta sumber daya keuangan. Setiap tahapan pekerjaan tersebut dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek, yang prosedurnya telah diatur dan ditetapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu pelaksanaan. Namun demikian, pada setiap tahapan-tahapan pekerjaan tersebut, adakalanya mengalami kendala, baik dari faktor manusia maupun sumber-sumber daya yang lain.

Ketika terjadi suatu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak, antara BBWS Bengawan Solo dengan penyedia jasa

konsultasi maka upaya penyelesaiannya dilaksanakan dengan prosedur-prosedur serta dasar hukum dalam perjanjian kontrak yang telah disepakati. Salah satu dasar hukum yang mendasari surat perjanjian antara BBWS Bengawan Solo dengan penyedia jasa konsultasi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dimana dalam PERPU RI disebutkan bahwa :

- a. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam KUH Pidana
- c. Jika dipilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi disebutkan apabila:

- a. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- b. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
- c. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk oleh pemerintah dan / masyarakat jasa konstruksi.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaan selama kerjasama pihak BBWS Bengawan Solo dan pihak penyedia jasa konsultan selama ini tidak atau belum pernah ditemukan kendala yang begitu besar sampai ke pengadilan ataupun pemutusan kontrak, biasanya hanya

kendala yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan. Dalam prakteknya, upaya yang dilakukan oleh kedua pihak untuk mengatasi kendala yang muncul dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat diantara para pihak

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kontrak antara BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Pembangunan Bendungan di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, dimana tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi: tahap pengumuman atau pengadaan pelelangan, tahap kualifikasi atau seleksi, tahap evaluasi, penetapan calon pemenang, tahap masa sanggah dan tahap pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kendala yang dihadapi BBWS Bengawan Solo dengan Penyedia Jasa Konsultasi dalam pembangunan Bendungan di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo, biasanya adalah kendala yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, dimana terkadang proses atau kemajuan pembangunan terlambat dari rencana yang dijadwalkan. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul tersebut adalah musyawarah dan mufakat diantara para pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kontrak pekerjaan antara BBWS Bengawan Solo Dengan penyedia jasa konsultasi tentang pembangunan bendungan di Wilayah Kerja BBWS Bengawan Solo, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Kepada penyedia jasa konsultasi sebaiknya mempelajari terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi. Sehingga dapat lebih memahami klausula-klausula yang ada dalam kontrak kerja yang mereka sepakati dengan pengguna jasa.

- b. Penyedia jasa konsultasi lebih bertindak profesional dan berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan. Sebab profesionalisme usaha mampu mendorong tingkat kepercayaan rekanan bisnis dan merupakan pencerminan dari perusahaan yang sehat dan bonafit, dalam upaya menopang lancarnya kegiatan pembangunan
- c. Pihak BBWS Bengawan Solo sebagai pihak yang memberikan tugas kerja, sebaiknya berkomitmen untuk menjamin adanya kepastian akan ketepatan waktu dalam mencairkan dana untuk proyek bendungan yang dibangun di daerah. Sehingga tidak merugikan pihak jasa konsultasi yang telah diberikan tugas sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT Indeks, 2009).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Burhan Bugin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Doni Judian, *Tahukah Anda Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014).
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan bagian pertama Hubungan Kerja*, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta, 1986.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publiishing
- Lexy J. Moeloeng 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 2008).
- R. Subekti, 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Internusa.
- Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Ghalia Indonesia. Jakarta 1988.
- Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research*, Jilid 1 cet 24, Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta : Sinar Grafika), Pasal 2. Afnil Guza, *op.cit.*
Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 2007).
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan